

PERKEMBANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Sri Lestari Hs.^{*)}

Abstrak

Komitmen yang kuat dari pemerintah telah mendorong perkembangan UMKM, demikian juga UMKM memiliki prospek yang baik untuk lebih diberdayakan. Kepentingan tersebut terkait dengan kondisi perekonomian nasional yang sekarang dan beberapa tahun kurang meyakinkan, berdasarkan kenyataan bahwa proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN berlangsung lambat, padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi.

Dengan optimisme bahwa pertumbuhan peran UMKM, serta potensi pembiayaan kredit dari perbankan untuk UMKM yang semakin membaik, maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Untuk tujuan tersebut yang diperlukan adalah dukungan dari Pemerintah, dan dari stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia, Perbankan, lembaga keuangan non bank, dan dunia usaha.

*Peningkatan pembiayaan UMKM akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup : 1) penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, 2) peningkatan kemampuan kewirausahaan, 3) peningkatan dalam jumlah dan kemudahan persyaratan dalam perkreditan perbankan, 4) pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan seperti penjaminan kredit, 5) meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro, 6) meningkatkan layanan KSP/USP koperasi, 7) peningkatan lembaga keuangan sekunder, 8) peningkatan jaringan informasi baik pusat maupun daerah, 9) Pengembangan **Multi Finance**.*

Pembiayaan efektif, peran meningkat

I. Perkembangan, Prospek, dan Permasalahan UMKM

Peningkatan peran dan kegiatan usaha UMKM semakin nampak sejak krisis tahun 1997, UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari data BPS 2003, yang menunjukkan populasi UMKM mencapai sekitar 48,39 juta unit atau 99,85% dari keseluruhan pelaku bisnis di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 42,33 juta usaha kecil dengan pertumbuhan 9,46% atau 3,15% per tahun selama kurun waktu 2000-2003, dan usaha menengah sebanyak 61.986 dengan pertumbuhan 13,46% atau 4,46% per tahun selama kurun waktu 2000-2003. Disamping itu UKM memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 99,4% dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.013,5 triliun atau 56,73%.

^{*)} Kasubid Evaluasi dan Pelaporan serta Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM

Dari data tersebut perkembangan UMKM dapat dikatakan cukup baik dan masih memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan, mengingat proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN berlangsung lambat, padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan untuk mendukungnya. Sebagaimana kita ketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: 1) manajemen, 2) permodalan, 3) teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, 8) kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu : 1) masih rendahnya atau terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura; 2) prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha; 3) tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi; 4) kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya. Kondisi tersebut mengakibatkan UMKM tetap tidak bisa menjangkau berbagai skim kredit yang disediakan pemerintah dimasa lalu, seperti: 1) 12 (dua belas) skim kredit program bersubsidi; 2) 16 (enam belas) skim kredit komersial; 3) 2 (dua) jenis skema pembiayaan; 4) 4 (empat) jenis pembiayaan bukan bank yaitu modal ventura, leasing, factoring; 5) skema pegadaian; 6) 4 (empat) skim penjaminan dan asuransi, dan; 7) 9 (sembilan) skim pembiayaan sektoral.

II. Strategi Pengembangan Pembiayaan UMKM

Diperkirakan pertumbuhan dan peran UMKM akan semakin meningkat dalam perekonomian kita disamping karena: a). iklim investasi dan iklim usaha yang selama ini menjadi kendala akan menjadi lebih baik dengan semakin seriusnya pemerintah mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penyebab buruknya sistem investasi seperti KKN, penegakan dan kepastian hukum, perpajakan, ketenagakerjaan, serta pelayanan birokrasi baik di pusat maupun di daerah, b) pemulihan sektor korporat atau perusahaan besar diperkirakan masih memerlukan waktu lama, karena permasalahan restrukturisasi yang kompleks

termasuk permasalahan hukum, hutang luar negeri yang masih cukup besar dan perlu penjadwalan kembali dengan krediturnya, c) dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperkirakan juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil.

Dengan optimisme pertumbuhan dan peran UMKM dan potensi pembiayaan kredit dari perbankan yang semakin baik, perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program yang jelas untuk mencapainya, yaitu dukungan apa yang dapat dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan maupun lembaga keuangan non bank, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya, agar UMKM benar-benar bisa menjadi pilar utama perekonomian. Peningkatan pembiayaan UMKM akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup : 1) penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, 2) peningkatan kemampuan kewirausahaan, 3) peningkatan dalam jumlah dan kemudahan persyaratan dalam perkreditan perbankan, 4) pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan seperti penjaminan kredit, 5) meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro, 6) meningkatkan layanan KSP/USP koperasi, 7) peningkatan lembaga keuangan sekunder, 8) peningkatan jaringan informasi baik pusat maupun daerah, 9) Pengembangan *Multi Finance*

III. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelembagaan UMKM dan perumusan kebijakan UMKM dan implementasinya, perbaikan kerangka pengaturan di tingkat nasional maupun daerah, peningkatan akses UMKM dan stakeholder terkait akses informasi. Lingkungan usaha yang tidak kondusif dari pengalaman selama ini telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang menimbulkan inefisiensi. Berbagai macam pungutan baik legal maupun ilegal, bermacam jenis perijinan yang tumpang tindih dengan birokrasi yang rumit, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme untuk memperlancar usaha, pelanggaran hak cipta, tidak terjaminnya keamanan menunjukkan wajah buruk iklim usaha di Indonesia, yang berdampak lemahnya daya saing produk kita disamping Indonesia menjadi tidak kompetitif sebagai tempat investasi. Dengan demikian berbagai peraturan dan persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan UMKM sebaiknya segera dihapus.

Selain penciptaan lingkungan yang kondusif, program pengembangan UMKM hendaknya diarahkan pada program pengembangan yang berorientasi pasar, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kebutuhan riil UMKM (*market oriented, demand driven program*), yang akan menghasilkan pertumbuhan produktivitas UMKM secara berkelanjutan, dan akan mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Secara terinci The Asia Foundation 2000 (dalam Thee Kian Wie, 2001) membagi fokus pengembangan UMKM baru yang berorientasi pasar dalam empat unsur pokok, yaitu: 1) pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM; 2) pengembangan lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan akses kredit yang lebih mudah,

mudah kepada UMKM atas dasar transparansi; 3) pengembangan jasa-jasa non finansial kepada UMKM yang lebih efektif; dan 4) pembentukan aliansi strategis antar UMKM atau UMKM dengan usaha besar di dalam negeri maupun luar negeri.

IV. Peningkatan kemampuan kewirausahaan

Untuk dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non bank yang mendasarkan pada kelayakan usaha, maka harus dilakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan di pihak UMKM. Peningkatan kemampuan kewirausahaan, organisasi, manajemen, ketrampilan teknis usaha yang digeluti, kemampuan inovasi, manajemen keuangan seperti perencanaan keuangan, maupun kemampuan menyusun proposal kelayakan usaha sangat dibutuhkan guna menjadikan UMKM ataupun wirausaha dengan produktivitas dan daya saing tinggi.

Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah kurangnya jumlah wirausaha dengan produktivitas dan daya saing yang tinggi. Upaya meningkatkan daya saing harus dimulai dari mengembangkan kewirausahaan dari para wirausahawan (pemilik dan pengelola unit usaha) yang telah ada serta menumbuhkan wirausaha atau minimal unit-unit usaha baru pada sektor-sektor yang produktif sesuai dengan potensi daerah. Pengembangan kewirausahaan juga diharapkan akan meningkatkan daya tahan bangsa, memperluas kesempatan kerja dan menanggulangi masalah kemiskinan, yang terbukti pada saat krisis ekonomi usaha kecil menengah dan koperasi yang mengandalkan bahan baku lokal dan memiliki keunggulan kompetitif mampu bertahan dan bahkan berkembang.

Kemauan masyarakat untuk menggeluti wirausaha sebagai penopang utama kehidupannya ditentukan oleh pemahaman masyarakat mengenai kewirausahaan, faktor sosial-ekonomi, budaya masyarakat, dan terbukanya kesempatan usaha. Hasil kajian Model Penumbuhan Usaha Baru yang dilakukan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tahun 2006 mengindikasikan sebagian besar responden obyek penumbuhan wirausaha ingin menjadi wirausaha, namun adanya pemahaman yang kurang 'pas' terhadap kewirausahaan menghambat mereka untuk mewujudkannya. Faktor penyebab ketidakinginan masyarakat menjadi wirausaha adalah merasa tidak mempunyai modal, merasa tidak berbakat, dan risiko bisnis terlalu besar. Upaya menyadarkan masyarakat (khususnya kelompok sasaran potensial, seperti: mahasiswa, generasi muda) perlu terus dilakukan, terutama mengenai: (1) modal bukan satu-satunya kunci sukses wirausaha, (2) kesuksesan wirausaha lebih ditentukan oleh kejelian dan keuletan wirausaha daripada bakatnya, dan (3) risiko usaha dapat diminimalisasi dengan cara membuat perencanaan bisnis yang baik.

Kemampuan teknik dan kemampuan bisnis yang dimiliki masyarakat akan mampu mengubah peluang usaha menjadi usaha baru yang menguntungkan. Menurut persepsi responden, faktor yang harus dimiliki untuk menjadi wirausaha adalah pengalaman dibidangnya, modal yang kuat dan bakat bawaan. Sebagian besar responden telah memiliki persepsi yang benar, bahwa pengalaman (teknik dan bisnis) merupakan faktor utama untuk menjadi wirausaha.

Penguasaan kemampuan teknik akan mendorong wirausaha untuk melakukan inovasi dan bekerja secara efisien. Pemberian informasi mengenai arah perkembangan produk, perkembangan teknologi produksi dan proses adopsi teknologi akan membantu meningkatkan kemampuan teknik dari wirausaha Indonesia. Upaya mengangkat, mentransformasikan dan memasyarakatkan teknologi pedesaan secara tepat akan sangat membantu kemampuan masyarakat pedesaan untuk memproduksi secara efisien dengan menggunakan peralatan yang sederhana, dan sekaligus akan merangsang daya inovatifnya.

Hambatan utama masyarakat untuk menjadi wirausaha adalah rasa tidak memiliki modal. Pemberian informasi dan kemudahan akses ke sumber modal dapat menghilangkan hambatan ini. Responden menyadari tingkat bunga yang tinggi tidak menjadi masalah, sepanjang prosedur pemberian pinjaman sederhana dan cepat. Beberapa responden wirausaha mikro dan kecil menyatakan sumber modalnya berasal dari pinjaman dengan tingkat bunga 2% - 10% per bulan yang berasal dari koperasi, BMT, BPR dan para pelepas uang, namun tetap menguntungkan. Penyederhanaan prosedur pinjaman merupakan awal yang baik untuk meningkatkan kesempatan usaha. Pola bantuan pinjaman lunak dari BUMN (program kemitraan dan bina lingkungan) perlu ada pembenahan lebih lanjut, agar lebih tepat sasaran, tepat guna, dan mempercepat akselerasi pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

V. Perkreditan Perbankan

Perkreditan perbankan yang selama ini harus dihadapi UMKM yaitu: 1) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu; 2) Kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha; 3) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi; 4) Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya, sehingga meskipun dimasa lalu pemerintah telah memberikan berbagai skim kredit bagi UMKM tetap saja skim-skim kredit tersebut tidak terjangkau.

Sejalan dengan telah pulihnya sektor perbankan, penguatan sektor keuangan khususnya perbankan dalam pemberian pembiayaan kepada UMKM perlu ditingkatkan, baik dari segi kelembagaan, produk, maupun pasar keuangan agar mampu menyediakan pembiayaan kepada UMKM dengan jumlah yang lebih besar dan jenis yang lebih banyak dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah. Berkaitan dengan hal tersebut penguatan kredit untuk sektor UMKM saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah, antara lain Presiden SBY turun langsung memimpin rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan agenda "peningkatan sistem jaminan kredit bagi UKM" di kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM awal Maret 2007, dan meminta penyaluran kredit untuk pengusaha kecil dapat dilakukan dengan mudah dengan cara paling mudah, perlu adanya jaminan kredit, perbankan agar melonggarkan persyaratan kredit dan tidak mematok bunga kelewat tinggi. Dalam kesempatan ini Wapres menyatakan : Rakortas kali ini bertujuan menggerakkan sektor riil, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Untuk itu

perbankan agar meningkatkan dan mempermudah kredit dengan aturan yang lebih rileks.

Menindaklanjuti komitmen pemerintah agar performa kredit usaha kecil dan menengah meningkat, BI pada tanggal 2 April 2007 akhirnya mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang intinya memperlonggar sejumlah persyaratan kredit perbankan bagi UKM. Pelonggaran meliputi tiga hal, yaitu: 1) ketentuan kredit bagi UKM dipermudah, bila selama ini kredit pada UKM harus memenuhi tiga syarat, yaitu prospek industri, sisi balanced, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar; 2) pelonggaran mengenai pemberian kredit bagi perusahaan yang bermasalah, yaitu bila perusahaan bermasalah bukan karena kesengajaan tapi akibat situasi makro dan eksternal perusahaan misalnya terjadinya bencana alam, maka perusahaan tersebut boleh mendapat kredit; 3) kemudahan bagi perusahaan yang berada dalam induk perusahaan (holding) bermasalah, tetapi unit perusahaan dinilai sehat dan tak bermasalah, maka dapat diberikan kredit .

Dalam hal penjaminan kredit, menurut Gubernur BI pemerintah berkomitmen memperkuat posisi Askrindo. Untuk memperkuat modal Askrindo dan Perum SPU, pemerintah akan menyertakan modal sebesar Rp. 1,4 triliun. Dengan dana sebesar Rp. 1,4 triliun tersebut akan dapat menjamin total kredit sebesar Rp. 28 triliun. Dengan asumsi masing-masing UMKM membutuhkan dana Rp. 8 juta-Rp. 10 juta, maka akan dapat melayani 3,5 juta unit UMKM, dan jika diasumsikan setiap UMKM mempekerjakan satu orang maka akan dapat menyerap 3,5 juta orang tenaga kerja.

Sejak triwulan I tahun 2007, sebelum diumumkannya pelonggaran kredit UMKM oleh BI, beberapa bank memang sudah memprogramkan akan memperbesar penyaluran kredit pada UMKM, seperti Permata Bank, Bank Mandiri, BRI, dan Bank Danamon. Bank Mandiri mengalokasikan kredit untuk sektor usaha kecil dan menengah sebesar Rp. 11,3 triliun, yang mana pada triwulan I persetujuan kredit untuk sektor tersebut telah meningkat dibanding periode sama tahun 2006. Bank BNI tahun ini menargetkan penyaluran kredit sektor UMKM sebesar Rp. 2,7 triliun, antara lain melalui peluncuran kredit baru yaitu BNI Wirausaha yang menawarkan kredit pada UKM dengan plafon Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, kredit UKM Syariah, dan jenis kredit UKM lainnya. Bank BRI sampai akhir tahun 2006 total kredit yang disalurkan mencapai Rp. 90 triliun, yang mana lebih dari 90% dari total kredit tersebut (Rp. 86 triliun) adalah kredit ke sektor UMKM, adapun kegiatan usaha yang paling banyak dibiayai adalah usaha perdagangan yaitu sekitar 26%.

Dari bank swasta, total kredit UKM yang disalurkan Bank Danamon tahun 2006 sebesar Rp. 8,4 triliun, dan tahun 2007 menargetkan penyaluran kredit untuk sektor UKM sebesar Rp. 1,6 triliun atau tumbuh sekitar 20%. Sasaran kredit UKM Bank Danamon meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, manufaktur, industri pengolahan dan jasa, yang menurut Bank Danamon pelaku sektor riil ini memiliki prospek baik dan memiliki ketahanan yang cukup baik pada saat negeri ini dilanda krisis. Bank Internasional Indonesia (BII) akan meningkatkan portofolio kredit usaha kecil dan menengah yang tahun 2006 baru mencapai 38% dari total portofolio kreditnya, melalui berbagai kerjasama dengan sejumlah pihak terkait. Salah satu kerjasama tersebut

adalah program pengembangan UMKM melalui koperasi dengan Skim Kredit Primer untuk Anggota (KKPA), dilakukan bekerjasama dengan Koperasi Paguyuban Pedagang Mie & Bakso Megapolitan Indonesia (PPMII). Selain itu, BII menyalurkan kredit UMKM melalui *linkage* program dengan BPR, yang mana telah disalurkan dana lebih dari Rp. 480 miliar kepada 87 BPR. Bank Permata menetapkan visi "menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang memiliki fokus pada segmen UKM dan konsumen."

Saat ini, setelah sekitar enam bulan dari diumumkannya pelonggaran ketentuan kredit bagi UMKM, perkembangan kredit UMKM memang mengalami peningkatan. Sebagai contoh penyaluran kredit UMKM Bank Mandiri sampai dengan akhir September 2007 telah mencapai Rp. 15 triliun, meningkat 33% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu, dan menargetkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 40% pada tahun 2008. Realisasi kredit UMKM antara lain dari pelaksanaan *linkage* program BPR untuk memudahkan menjangkau UMKM, terutama usaha mikro di daerah terpencil. Hingga saat ini telah bekerja sama dengan 1800 BPR yang mengelola dana Rp. 2 triliun. Selain memberikan kredit Bank Mandiri juga menunjukkan kepedulian dalam penumbuhan wirausaha baru, ditunjukkan dengan adanya kerjasama dana hibah modal usaha mahasiswa UI, bertajuk Wirausaha Mandiri 2007 bernilai Rp. 800 juta. Dalam program ini perseroan pengetahuan wirausaha kepada mahasiswa/i tingkat terakhir sehingga setelah lulus tidak mencari pekerjaan tapi menciptakan lapangan kerja. Demikian halnya BRI, telah mempertahankan penyaluran kredit korporasi 20%, dan sebagian besar disalurkan untuk sektor UMKM. Tahun 2008 ditargetkan pertumbuhan kredit 20% yaitu mencapai Rp. 125 triliun, yang sebagian besar juga akan disalurkan pada sektor UMKM dan akan ditambah Rp.16 triliun. Menurut Direktur Utama Sofyan Basir, BRI memang didesain untuk UMKM, menikmati laba juga dari UMKM, harga saham BRI naik karena profil kredit UMKMnya, dan pengalaman selama ini begitu keluar dari khitah UMKM maka masalah akan muncul berupa kredit macet. Sejalan dengan pelonggaran kredit UMKM, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III mencapai 6,5% lebih tinggi dibanding dengan prediksi terakhir Departemen Keuangan 6,2%-6,4%, yang komponen terbesar dari sektor pertanian, dan terlihat pula kenaikan investasi dan ekspor yang mencapai US\$ 9,8 miliar, yang mana kenaikan ekspor tersebut 20,21% merupakan kontribusi dari ekspor produk UKM, dan di tahun 2008 ekspor produk UKM ditargetkan naik 15% mengingat masih adanya peluang pasar yang cukup besar.

VI. Penjaminan Kredit

Meskipun telah dilakukan pelonggaran dalam kredit perbankan atau ketentuan kredit bagi UMKM dipermudah, yaitu bila selama ini kredit pada UMKM harus memenuhi tiga syarat, yaitu: prospek industri, sisi balanced, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar. Berarti kredit perbankan UMKM mendasarkan pada kelayakan usaha, maka UMKM harus melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuannya. Dalam hal ini, hanya UMKM yang memiliki usaha layak dan memiliki manajemen dan administrasi rapi yang akan cepat bisa memanfaatkan kredit perbankan. Dengan prasyarat seperti itu, maka tidak akan banyak pula UMKM yang dapat memanfaatkan kredit bank.

Untuk itu, agar kemudahan kredit tersebut dapat optimal bisa dimanfaatkan UMKM masih perlu dukungan penjaminan kredit.

Penjaminan keuangan adalah suatu perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada pihak yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak bisa dibayar penuh oleh peminjam. Di Indonesia telah beroperasi perusahaan penjaminan, yaitu Perum Pengembangan Sarana Usaha (Perum Sarana), yang pada awal berdirinya (tahun 1971) merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), P.T. Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (P.T. PKPI), P.T. ASKRINDO, yang selama ini sudah cukup membantu perkreditan UMKM, namun karena keterbatasan dana dan kemampuannya, layanan perusahaan penjaminan tersebut dirasakan masih sangat terbatas. Untuk itu pemerintah memandang perlu meningkatkan penjaminan kredit tersebut dengan menyediakan dana penjaminan kredit UMKM yang dimulai pada tahun 2002 dan Dana MAP Pola Penjaminan tahun anggaran 2001 dari eks BPS KPKM. Pada tahun 2003 Dana Penjaminan UMKM berjumlah Rp. 95 miliar Alokasi dana Penjaminan Kredit UMKM dari TA 2001 s.d. T A 2004 sebesar Rp. 260 miliar, dan meningkat dari tahun ke tahun mencapai Rp. 851 milyar lebih pada pertengahan Januari 2008 dengan debitur sebanyak 2.768 UMKM. Program ini telah mendorong semakin besarnya minat menumbuhkan lembaga penjaminan kredit di daerah. Terdapat beberapa Dinaskop dan UKM tingkat propinsi yang mendorong tumbuhnya lembaga penjaminan kredit UMKM di daerah, seperti Propinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur,

Dalam hal penjaminan kredit, untuk lebih mengoptimalkan kemudahan kredit perbankan untuk UMKM yang diluncurkan awal 2007, menurut Gubernur BI pemerintah berkomitmen memperkuat posisi Askrindo. Untuk memperkuat modal Askrindo dan Perum SPU, pemerintah akan menyertakan modal sebesar Rp. 1,4 triliun. Dengan dana sebesar Rp. 1,4 triliun tersebut akan dapat menjamin total kredit sebesar Rp. 28 triliun. Dengan asumsi masing-masing UMKM membutuhkan dana Rp. 8 juta-Rp. 10 juta, maka akan dapat melayani 3,5 juta unit UMKM, dan jika diasumsikan setiap UMKM mempekerjakan satu orang maka akan dapat menyerap 3,5 juta orang tenaga kerja

Berkaitan dengan pengoptimalan daya guna penjaminan kredit yang disediakan pemerintah, dari hasil penelitian Tim Peneliti Litbang Direktorat Perbankan Syariah Bank merekomendasikan agar program penjaminan pembiayaan UMKM dari pemerintah jangan hanya melibatkan 6 (enam) saja antara lain : Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI, melainkan juga seluruh Bank Syariah yang selama ini telah berkembang pesat, dan berdasarkan publikasi BI perSeptember 2007 telah berjumlah 28 (dua puluh delapan) yang terdiri 3 (tiga) Bank Syariah Umum dan 25 Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Tim Peneliti, dukungan pemerintah untuk memberikan jaminan sangat dibutuhkan untuk mendorong perbankan syariah dapat mengembangkan sektor UMKM. Selain itu Tim Peneliti juga menyarankan agar Pemda tingkat propinsi maupun kodya/kabupaten juga mencanangkan program penjaminan pembiayaan syariah untuk UMKM di daerah masing-masing mengingat dana pemerintah pusat juga terbatas, yang diambil dari pos pemberdayaan masyarakat dalam APBD, yang mana dana tidak seluruhnya digelontorkan dalam program pengentasan kemiskinan, tetapi sebagian untuk program penjaminan.

VII. Peningkatan Lembaga Keuangan Mikro dan Layanan KSP/USP Koperasi

Lembaga Keuangan Mikro (LKM atau *microfinance*) keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitarnya untuk keperluan konsumtif maupun UMKM untuk usaha produktif yang relatif tidak bisa menjangkau lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan mikro jenisnya bermacam-macam, ditinjau dari sisi kelembagaan, tujuan pendirian, budaya masyarakat, program pemerintah atau sasaran lainnya. Secara umum, lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Lembaga keuangan mikro formal terdiri dari bank seperti Bank Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI unit dan non bank seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi/KUD, dan Pegadaian. Adapun lembaga keuangan mikro non formal antara lain berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Maal wa Tanwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Mandiri (LPEM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UESDP), dan berbagai bentuk kelompok lainnya.

Pengembangan LKM efektif bagi pelayanan permodalan UMKM karena beberapa merupakan sistem pembiayaan *grass root*, secara fisik dekat dengan nasabahnya sehingga benar-benar memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan, dan kemudahan dalam pengawasan. Namun pengembangan LKM termasuk KSP dan USP koperasi menghadapi beberapa permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal, antara lain seperti terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, permodalan, masih kurangnya kepercayaan masyarakat, lemahnya jaringan (*networking*) dan inovasi dibidang pemasaran, terbatasnya teknologi informasi yang dimiliki, sistem dan prosedur operasional yang belum mapan, serta belum optimalnya pengawasan dan pembinaan dari otoritas yang berwenang.

Dalam meningkatkan permodalannya meskipun kredit perbankan telah diperlonggar, atau ketentuan kredit bagi UMKM dipermudah, namun masih sangat banyak UMKM maupun LKM yang belum siap menjangkau, karena beberapa permasalahan yang dihadapi LKM seperti diuraikan diatas, maka program perkuatan permodalan pola dana bergulir melalui lembaga keuangan mikro (KSP/USP koperasi) yang telah dilaksanakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM masih dilanjutkan. Program ini harus diposisikan sebagai stimulan, dengan tujuan meningkatkan lembaga keuangan mikro, yaitu meningkatkan layanan KSP/USP koperasi, sehingga mampu melayani kebutuhan permodalan UMKM anggotanya secara mandiri. Disamping perkuatan permodalan pola dana bergulir, untuk meningkatkan usaha dan pelayanan KSP telah dilakukan kerjasama penyaluran kredit bank umum kepada UMKM melalui koperasi yang disebut *linkage program*. Masuknya gerakan koperasi dalam *linkage program* merupakan hal yang patut dibanggakan, karena hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada koperasi, tentu saja hanya koperasi yang kinerjanya baik yang terpilih dalam program ini dan dalam pelaksanaannya koperasi harus benar-benar menjaga amanah.

VIII. Pengembangan Pembiayaan *Multifinance*

Selain pengembangan pembiayaan sebagaimana diuraikan diatas masih ada beberapa sistem pembiayaan (*multifinance*) yang dapat dimanfaatkan UMKM, antara lain: modal ventura, anjak piutang (*factoring*), *penyewaan* (*leasing*), pegadaian, dana BUMN dan sebagainya. Pemilihannya tergantung UMKM sendiri, berdasarkan kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. Modal ventura merupakan salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap propinsi/daerah istimewa telah berdiri Perusahaan Modal Ventura Daerah (LMVD) yang menyediakan modal produktif bagi UMKM.

IX. Kesimpulan

1. Dengan optimisme pertumbuhan dan peran UMKM dan potensi pembiayaan kredit dari perbankan yang semakin baik, perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program yang jelas untuk mencapainya, yaitu dukungan apa yang dapat dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan maupun lembaga keuangan non bank, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya, agar UMKM benar-benar bisa menjadi pilar utama perekonomian.
2. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelembagaan UMKM dan perumusan kebijakan UMKM dan implementasinya, perbaikan kerangka pengaturan ditingkat nasional maupun daerah, peningkatan akses UMKM dan stakeholder terkait akses informasi.
3. Untuk dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non bank yang mendasarkan pada kelayakan usaha, maka harus dilakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan dipihak UMKM. Peningkatan kemampuan kewirausahaan, organisasi, manajemen, ketrampilan teknis usaha yang digeluti, kemampuan inovasi, manajemen keuangan seperti perencanaan keuangan, maupun kemampuan menyusun proposal kelayakan usaha sangat dibutuhkan guna menjadikan UMKM ataupun wirausaha dengan produktivitas dan daya saing tinggi.
4. Menindaklanjuti komitmen pemerintah agar performa kredit UMKM meningkat, BI pada tanggal 2 April 2007 akhirnya mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang intinya memperlonggar sejumlah persyaratan kredit perbankan bagi UMKM. Pelonggaran meliputi tiga hal, yaitu: 1) ketentuan kredit bagi UMKM dipermudah, bila selama ini kredit pada UMKM harus memenuhi tiga syarat, yaitu prospek industri, sisi balanced, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar; 2) pelonggaran mengenai pemberian kredit bagi perusahaan yang bermasalah, yaitu bila perusahaan bermasalah bukan karena kesengajaan tapi akibat situasi makro dan eksternal perusahaan misalnya terjadinya bencana alam, maka perusahaan tersebut boleh mendapat kredit; 3) kemudahan bagi perusahaan yang berada dalam induk perusahaan (holding) bermasalah, tetapi unit perusahaan dinilai sehat dan tak bermasalah, maka dapat diberikan kredit.

5. Kredit perbankan UMKM mendasarkan pada kelayakan usaha, maka UMKM harus melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuannya. Dalam hal ini, hanya UMKM yang memiliki usaha layak dan memiliki manajemen dan administrasi rapi yang akan cepat bisa memanfaatkan kredit perbankan. Dengan persyaratan seperti itu, maka tidak akan banyak pula UMKM yang dapat memanfaatkan kredit bank. Untuk itu, agar kemudahan kredit tersebut dapat optimal bisa dimanfaatkan UMKM masih perlu dukungan penjaminan kredit.
6. Pengembangan LKM efektif bagi pelayanan permodalan UMKM karena beberapa merupakan sistem pembiayaan *grass root*, secara fisik dekat dengan nasabahnya sehingga benar-benar memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan, dan kemudahan dalam pengawasan .

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2005). *Pedoman Pengembangan Kewirausahaan, Basik Penumbuhan Wirausaha Baru*. Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya. Jakarta.
- Anonim, (2002). *Strategi Pengembangan Iklim Usaha dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah*, Jurnal Ekonomi UNTAR, Vol 7 Nomor 1. Jakarta.
- Anonim, (2006). *Kajian Model Penumbuhan Unit Usaha Baru*, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), (2001). *Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah dan Ekspor Usaha Kecil dan Menengah*. BPS. Jakarta.
- Junaidi, A, (2003). *Prospek Rintisan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah*. Infokop Nomor 22 tahun XIX Membangun Sistem Keuangan Koperasi. Jakarta.
- Taufiq, M, (2003). *Membangun Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*, dalam Infokop Nomor 23 XIX Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta.
- The Asia Foundation, (1999). *Small and Medium Enterprise Development*. Jakarta.